

RELASI AKTOR DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN KEMBALI BERSEKOLAH DI KABUPATEN BREBES

Muhammad Razi Farizi^{1*}, Slamet Rosyadi², Tobirin³

^{1,2,3}Jurusan Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

*muhammad.farizi@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

Program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) di Kabupaten Brebes berawal dari IPM yang rendah di Provinsi Jawa Tengah yakni 64,16. Hal ini karena tingginya angka putus sekolah (ATS) di Brebes. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi aktor dan tantangan dalam implementasi Program Gerakan Kembali Bersekolah di Kabupaten Brebes. Metode penelitian kualitatif ini menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi. Penelitian dilakukan pada bulan Mei tahun 2022. Analisis data penelitian menggunakan metode Miles Saldana dan Huberman. Hasil penelitian menemukan aktor yang terlibat pada players adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP). Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes berperan penting karena program ini menjadi kewajiban dalam pelayanan dasar bidang pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan, serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat Brebes. FMPP merupakan lembaga khusus yang mengawal ATS kembali bersekolah. Relasi aktor yang terlibat dalam GKB ini dilakukan dengan melakukan rapat koordinasi per tiga bulan di tingkat desa. Rapat dilakukan untuk menyampaikan kendala di lapangan dan menyampaikan solusi dari pengurus FMPP di level desa. Kemudian dilakukan evaluasi keseluruhan yang melibatkan FMPP Kabupaten, kecamatan dan desa. Tantangan dalam implementasi program Gerakan Kembali Bersekolah di Kabupaten Brebes terbagi menjadi empat. Dari pemerintah adalah pencapaian target belum menyeluruh dan anggaran yang terbatas. Dari siswa target GKB adalah masih ada siswa yang malas belajar, anggapan masuk sekolah negeri lebih susah dan siswa yang terlibat dalam bullying. Terutama korban menjadi takut sekolah. Dari sekolah ada yang menolak karena kewalahan dengan jumlah siswa dan menolak karena siswa GKB yang masuk adalah pelaku bullying. Dari masyarakat adalah dana GKB untuk keperluan lain di luar sekolah, anggapan ijazah tidak penting, dan menyuruh anak membantu orangtua mencari nafkah.

Kata Kunci: Implementasi, Gerakan Kembali Bersekolah, Relasi Aktor

Abstract

Program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) in Brebes Regency started from a low HDI in Central Java Province, namely 64.16. This is because of the high dropout rate (ATS) in Brebes. This study aims to analyze the relationship between actors and challenges in the implementation of the Back to School Movement Program in Brebes Regency. This qualitative research method uses data collection methods with interviews, observations. The study was conducted in May 2022. Analysis of research data using the Miles Saldana and Huberman method. The results of the study found that the actors involved in the players were the Department of Education, Youth and Sports and the Community Care Forum for Education (FMPP). The Department of Education, Youth and Sports of Brebes Regency plays an important role because this program is an obligation in the basic services in the field of education in a gradual and sustainable manner, and is fair to all Brebes people. FMPP is a special institution that oversees ATS's return to school. The relationship between actors involved in the GKB is carried out by holding coordination meetings every three months at the village level. The meeting was held to convey the obstacles in the field and convey the solutions from the FMPP management at the village level. Then an overall evaluation was carried out involving the district, sub-district and village FMPPs. The challenges in implementing the Back to School Movement program in Brebes Regency are divided into four. From the government, the achievement of targets has not been comprehensive and the budget is limited. Of the GKB target students, there are still students who are lazy to study, the assumption is that entering public schools is more difficult and students are involved in bullying. The victims become afraid of school. Some of the schools refused because they were overwhelmed with the number of students and refused because the incoming GKB students were bullies. From the community

are GKB funds for other purposes outside of school, the assumption that diplomas are not important, and telling children to help their parents earn a living.

Keywords: Implementation, Gerakan Kembali Bersekolah, Actor Relations

PENDAHULUAN

Setiap negara menghadapi masalah kemiskinan meski prosentasenya berbeda. Negara Indonesia juga salah satunya. Kemiskinan di Indonesia yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat penduduk miskin yang jumlahnya 27,55 juta pada September 2020. Jumlah penduduk miskin ini meningkat 2,76 juta dibandingkan bulan September 2019 yang jumlahnya berada pada angka 24,97 juta orang (BPS, 2021). Kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Seperti yang dikatakan Susanto et al., (2018) bahwa kualitas SDM ditentukan pada semakin tingginya faktor tingkat pendidikan masyarakatnya. Apabila pendidikan semakin tinggi, manusia cenderung produktif. Semakin produktif masyarakat maka pendapatan meningkat dan tidak berada dalam kemiskinan. Kesempatan memperoleh pendidikan yang dimiliki keluarga miskin lebih kecil dibandingkan dengan keluarga yang memiliki pendapatan lebih tinggi (Yang & Qiu, 2016). Pendidikan yang tinggi dapat terbentuk pada berapa lama mereka menempuh pendidikan atau pada tingkatan pendidikan tinggi, sedangkan mereka yang tidak mengenal pendidikan akan jauh dari kualitas yang tinggi sebagaimana manusia. Kebijakan pendidikan di daerah dalam konteks otonomi daerah melalui kebijakan desentralisasi yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan, dan kebijakan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003.

Kabupaten Brebes merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dan luas wilayah paling luas kedua setelah Kabupaten Cilacap. Anak usia sekolah di Kabupaten Brebes kurang lebih 514.000 anak, dari jumlah tersebut terdapat 17.420 anak yang teridentifikasi dalam baseline data ATS 2018 sebagai anak tidak sekolah dengan rincian usia 7-12 tahun sebanyak 8.820 anak, usia 13-15 tahun sebanyak 7.730 anak dan usia 16-18 tahun sebanyak 870 anak. Selain APM, APK, dan APS, Kabupaten Brebes juga perlu memperhatikan Angka Melanjutkan (AM) khususnya dari SMP/MTs ke SMA/MA yang hanya mencapai 74,95% pada tahun 2017 (Analisis Belanja Publik Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Brebes, 2019: 13).

Kondisi tersebut membuat Kabupaten Brebes berinovasi mengeluarkan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB). Melalui Peraturan Bupati Brebes No. 115/2017 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan Dua Belas Tahun, GKB merupakan salah satu inovasi untuk meningkatkan IPM Kabupaten Brebes. Unsur yang terlibat di dalam FMPP diantaranya lembaga swadaya masyarakat, media, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi profesi, Forum Corporate Social Responsibility, dan keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik ditingkat kabupaten, kecamatan dan pemerintahan di level desa. Relasi para aktor dalam implementasi program GKB ini diperlukan agar program berjalan baik dan tepat sasaran.

Relasi aktor sebagai hubungan atau interaksi antara dua orang atau lebih yang sifatnya timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi terutama dalam implementasi program GKB. Selain karena faktor ekonomi yang menyebabkan wali murid tidak dapat membiayai anaknya bersekolah, kultur masyarakat yang beranggapan pendidikan tidak penting ditunjukkan dengan alasan siswa tidak sekolah (Andriyanto, 2017: 749).

Untuk mewujudkan tujuan GKB yang tepat sasaran diperlukan relasi aktor yang terlibat didalamnya. Keterlibatan para aktor dalam program GKB ini penting untuk menyukseskan pelaksanaan sebuah kebijakan dari pemerintah. Relasi antar aktor dalam proses kebijakan publik membuktikan bahwa pembuatan kebijakan tidak lepas dari keterlibatan aktor dalam kebijakan publik itu sendiri. Brysson (2004: 30) berpendapat bahwa menganalisis peran pemangku kepentingan (aktor) membagi aktor menjadi dua kelompok sesuai dengan kepentingan mereka dalam masalah dan kekuatan mereka untuk mempengaruhi masalah untuk mengaturnya. matriks

baris dan kolom. Kepentingan adalah kepentingan aktor dalam pembuatan kebijakan, dan kekuasaan adalah kemampuan aktor untuk mempengaruhi atau membentuk kebijakan

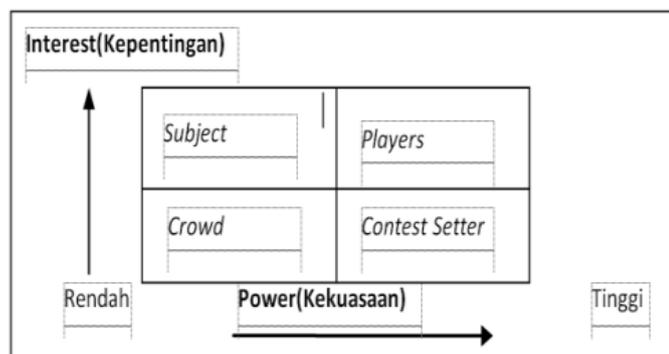
Selanjutnya merujuk menggunakan model Stakeholders Mapping Analysis milik Bryson (2004), aktor dikelompokkan menjadi contest setter, players, subject dan crowd. Tujuan dari pengelompokan aktor yang terlibat dalam program GKB adalah untuk menganalisa pihak-pihak yang terkait meliputi peran-perannya, relasi antar aktor dan tantangan yang dihadapi.

Stakeholder adalah pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi/lembaga yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja organisasi/lembaga dan menciptakan tata kelola yang baik. Menurut Bryson (2004), pemangku kepentingan dapat dibagi menjadi tiga bidang: protagonis, pendukung dan protagonis. Pemangku kepentingan utama memiliki kepentingan langsung dalam keputusan yang dibuat. Aktor-aktor kunci ini bertanggung jawab untuk membuat keputusan dan implementasinya, dan untuk penerima manfaat dari keputusan tersebut. Pemangku kepentingan sekunder tidak terpengaruh secara langsung, tetapi menangani masalah dan masalah pengambilan keputusan. Pemangku kepentingan material, di sisi lain, adalah pemangku kepentingan dengan otoritas hukum atas pengambilan keputusan.

Analisis Pemetaan Pemangku Kepentingan, atau pemetaan pemangku kepentingan, adalah proses mengidentifikasi individu atau kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan yang akan diambil, dan mengelompokkannya menurut dampak tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Pemetaan pemangku kepentingan dapat membantu menilai lingkungan politik dan menentukan jalur negosiasi yang optimal dalam debat politik. Dengan mengetahui analisis pemetaan pemangku kepentingan, analisis kebijakan diharapkan dapat berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pemangku kepentingan tersebut.

Menurut Bryson (2004), analisis pemangku kepentingan membantu pembuat kebijakan menghindari kebijakan yang "gagal" karena mereka tidak menyadari kepentingan dan informasi pemangku kepentingan utama. menghubungkan banyak peserta. Sebagai aspek penting dari pemecahan masalah. Meningkatkan kinerja organisasi, membantu lembaga publik berhasil dalam mencapai tujuan mereka; Memberikan kontribusi yang signifikan dan menciptakan nilai melalui pengaruhnya terhadap suatu fungsi atau aktivitas dalam strategi manajemen. Di bawah ini adalah matriks analisis peran pemangku kepentingan oleh Bryson (2004).

Beberapa kajian yang pernah meneliti menggunakan model Bryson (2004) Namun fokus penelitian berbeda yaitu membahas mengenai kebijakan kota layak anak di Kota Semarang. (Feri Andriyanto, 2017). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kurangnya pemahaman peran yang dimiliki beberapa stakeholders dan koordinasi yang kurang berjalan dengan baik dalam menjalankan kebijakan kota layak anak di kota Semarang. Kedua, penelitian ini membahas mengenai kebijakan pemerintah kota Malang dalam strategi penanggulangan kemiskinan (Chandra Nugroho, 2017). Penelitian ini menyebutkan bahwa interaksi kepentingan antar aktor diperlukan dalam proses pelaksanaan kebijakan. Interaksi tersebut berupa koordinasi antara stakeholder. Sehingga tanpa adanya koordinasi yang baik, kebijakan pengentasan kemiskinan tentunya tidak akan tercapai. Kajian terakhir yaitu mengenai kebijakan pemerintah kota malang dalam strategi penanggulangan kemiskinan daerah kota malang (Niken Larasati, 2017). Penelitian ini menjelaskan bahwa aktor yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan seperti Pemerintah Kota.



Gambar 1. Matriks Analisis Peran Stakeholder Menurut Bryson (2004)

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a) *Contest setter* yaitu stakeholder yang berpengaruh tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan tetapi sedikit kepentingan. sehingga mereka memiliki risiko yang signifikan untuk harus dipantau dalam proses pelaksanaan kebijakan.
- b) *Players* yaitu stakeholder yang aktif terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Stakeholder ini mempunyai kepentingan serta pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu program kebijakan.
- c) *Subject* yaitu stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi tetapi kekuasaan yang rendah. Walaupun mereka mendukung kegiatan, kapasitasnya terhadap dampak mungkin tidak ada. Stakeholder ini dapat menjadi pengaruh jika membentuk aliansi dengan stakeholder lainnya
- d) *Crowd* yaitu stakeholder yang memiliki kepentingan dan kekuasaan yang rendah dalam pelaksanaan kebijakan. Namun stakeholder ini memiliki pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan. Kepentingan dan pengaruh yang dimiliki akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan dari pelaksana kebijakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendidikan sangat penting bagi kelangsungan hidup negara/negara. Memperoleh talenta terbaik membutuhkan proses pendidikan yang baik. Proses pendidikan yang baik tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan, tetapi juga didukung oleh peran masyarakat, swasta dan pemerintah.

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah jumlah siswa yang ideal bagi setiap guru untuk menjamin proses belajar mengajar yang berkualitas dengan hasil yang diharapkan. Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

Pada matriks analisis peran stakeholder menurut Bryson (2004) tersebut di atas terdapat bagan-bagan tersendiri. Pada bagan Contest Setter ditunjukkan pengaruh kekuasaannya tinggi namun sedikit kepentingan. Stakeholder ini harus dipantau karena berpotensi memunculkan resiko. Players merupakan stakeholder yang aktif karena antara kepentingan dan kekuasaan sama-sama tinggi pengaruhnya pada suatu kebijakan atau program. Pada Subject kepentingannya tinggi namun pengaruhnya rendah sehingga ketika subject mendukung suatu kebijakan atau program maka kapasitas terhadap dampaknya mungkin tidak ada. Subject ini mampu memberikan pengaruh apabila bekerja sama dengan stakeholder yang lainnya. Pada Crowd, antara kepentingan dan pengaruhnya cenderung rendah. Hal ini membuat pengaruh dan kepentingan crowd pada suatu program atau kebijakan dapat berubah dari waktu ke waktu.

Angka tersebut juga memperhitungkan terjadinya perubahan penduduk, terutama penduduk usia muda. APS pendidikan dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar atau sedang sekolah (SD-SMP) per 1.000 penduduk usia pendidikan dasar. APS sebagai indikasi bertambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah. Jadi semakin tinggi angka partisipasi sekolah, dapat diartikan semakin baik infrastruktur yang tersedia, dan semakin baik pula akses penduduk terhadap pendidikan.

Kondisi ideal tersebut belum dapat dipenuhi Kabupaten Brebes karena memiliki jumlah ATS yang besar yaitu 17.645 orang. Ditambah lagi angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Brebes sampai 2019 masih 6,19 tahun. Artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Brebes belum menamatkan pendidikan dasar 9 tahun. Kondisi tersebut membuat Kabupaten Brebes berinovasi mengeluarkan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB). Melalui Peraturan Bupati Brebes No. 115/2017 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan Dua Belas Tahun, GKB merupakan salah satu inovasi untuk meningkatkan IPM Kabupaten Brebes.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami fenomena empiris Metode kualitatif juga merupakan teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis atau lisan dari orang atau aktor yang diamati. Metode penelitian kualitatif adalah metode pemecahan masalah dengan menggambarkan subjek penelitian saat ini dan subjek penelitian berdasarkan fakta, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Brebes dengan membagi aktor-aktor yang terlibat serta partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program gerakan kembali bersekolah di Kabupaten Brebes yang terlibat dalam dilakukan untuk sejauh mana relasi aktor dalam pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti meliputi Wawancara Mendalam, Observasi dan Dokumentasi.

Analisis data adalah "proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar". Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan Interactive Model dengan Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pendidikan yang baik bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara pendidikan semata, tetapi didukung perannya oleh masyarakat, swasta dan pemerintah yang dalam hal ini bertindak sebagai pemegang amanah tertinggi dari UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Pembangunan kualitas pendidikan di Indonesia harus dilakukan secara bersama samabersamasama tidak hanya bagi pemerintah dan para pendidik tetapi juga perlu melibatkan masyarakat, karena masyarakat memiliki peran penting untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang berkualitas. Komponen pendidikan yang meliputi raw material (input siswa) , tools (alat-alat dan sarana prasarana), serta process (metode pembelajaran) adalah sebuah sistem yang akan menentukan kualitas outputout put (lulusan), sedangkan stakeholderstake holder yang terdiri atas siswa, guru, kepala sekolah, wali murid, dinas terkait dan pemerintah daerah harus se- visi dan sinergi sehingga memperlancar dan mempermudah pencapaian tujuan baik tujuan akademis maupun pembentukan moral. Tujuan Pendidikan Nasional di Negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia,yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa,berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, tangguh, cerdas, kreatif, terampiltrampil, disiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohaniruhani.

Pendidikan juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, dan kesetiakawanan sosial serta sadar pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berorientasi masa depan. Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) di Kabupaten Brebes adalah upaya perbaikan akses pelayanan dasar bidang pendidikan di Kabupaten Brebes. GKB dirintis sejak tahun 2016, dimana ada desakan dari masyarakat pemerhati pendidikan yang merintis awal dengan mengembalikan Anak Tidak Sekolah melalui sekelompok kecil yang saat itu dinamakan Celoteh Brebes Membangun (CBM), mereka secara swadaya melakukan upaya konfirmasikonfirmasi anak yang tidak sekolah, mengembalikan ke sekolah, menggalang dana swadaya, dan melakukan pendampingan baik di sekolah maupun di rumah ATS yang ada dengan mengembalikan ATS saat itu hanya 30 anak saja yang tersebar di Kecamatan Larangan dan Ketanggungan. Pengalaman selama melakukan upaya pengembalian, lalu di FGD kan di level dilevel pemerintah Kabupaten Brebes secara intensif, dan tahun 2017 mulailah dicanangkandi canangkan launching Gerakan Kembali Bersekolah oleh Bupati Brebes di Pendopo Brebes dengan menghadirkan Forkompinda, Forkompincam, Organisasi PerangkatPerangkatata Daerah di lingkungan Pemkab Brebes, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, LSM, Media, dan perwakilan Kepala Desa dan pengurus FMPP yang terbentuk.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Brebes mulai bergerak dengan melibatkan relawan CBM, untuk masuk dalam kelembagaan resmi yang dipayungi regulasi Pemerintah Kabupaten

melalui Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) yang dikukuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun 2016. Sejak itulah, ada komitmen yang kuat antara relawan pendidikan ini dan menyepakati bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dalam hal ini adalah Bapperlitbangda Kabupaten Brebes dengan menyepakati pengembalian ATS ke Sekolah sebanyak 1000 anak, dan dipastikan mereka belajar di sekolah. Komitmen kuatnya, diselenggarakannya Launching GKB dan Penggalangan dana untuk membantu ATS yang dikembalikan ke sekolah, karena saat itu belum ada alokasi dari dana APBD Kabupaten ataupun dari dana desa. Tim pengarah GKB terdiri dari pemerintah yang diwakili oleh Bupati, Sekretaris Daerah, Baperlitbangda, Dindikpora, Dinpermasdes, Dinkominfotik, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Kantor Kemenag, Kabag Tapem, Kabag Hukum, Kabag Kesra dan Camat.

- 1) Memastikan ada keterlibatan masyarakat dalam partisipasi di bidang pendidikan, dengan spesifik pada kerja-kerja pengumpulan data, pengembalian, pendampingan anak tidak sekolah agar mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti pembelajaran di satuan pendidikan.
- 2) Memastikan agar proses perencanaan, penganggaran dan kesinambungan program untuk Anak Tidak Sekolah yang dikembalikan ke sekolah mendapatkan prioritas setiap tahunnya di APBD, dan Dana Desa.

Aktor yang terlibat pada players adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP). Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes berperan penting karena program ini menjadi kewajiban dalam pelayanan dasar bidang pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan, serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat Brebes. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup negara/negara. Memperoleh talenta terbaik membutuhkan proses pendidikan yang baik. Proses pendidikan yang baik tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan, tetapi didukung melalui perannya oleh masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP 25 Tahun 2005 serta UUD 1945, maka semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Namun, hingga saat ini, tidak semua masyarakat Indonesia memiliki akses pendidikan karena terkendala oleh masalah kemiskinan. Kemiskinan dan pendidikan merupakan dua aspek yang erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan menyebabkan masyarakat memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan, namun pendidikan bertujuan untuk mengeluarkan masyarakat dari jebakan kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab tidak meratanya pemerataan pendidikan dan salah satu penyebab permasalahan pendidikan di Indonesia.

Upaya pemerintah Kabupaten Brebes untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yaitu salah satunya melalui program GKB. Program ini diberikan kepada Anak Tidak Sekolah (ATS).

Tabel.1 Pencapaian Program GKB Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi
2017	1.000 ATS	1.212 ATS
2018	5.000 ATS	4.074 ATS
2019	8.000 ATS	5.118 ATS
2020	12.000 ATS	6.531 ATS
2021	17.420 ATS	6.424 ATS

Sumber: Baperlitbangda Kab. Brebes

Pelaksanaan program GKB ini mendapat tantangan di lapangan yang harus segera diatasi oleh Pemkab Brebes. Tantangan dalam implementasi program Gerakan Kembali Bersekolah di Kabupaten Brebes ada dari beberapa sektor. Tantangan tersebut adalah:

1. Pemerintah
 - a) Cakupan pencapaian yang masih sedikit dalam kuota siswa yang dianggarkan oleh APBD
 - b) Anggaran masih terbatas
2. Siswa target GKB

- a) Malas belajar dan memilih untuk mencari pekerjaan meski tidak selesai pendidikan wajib dasar.
 - b) Anggapan siswa masuk sekolah negeri lebih susah dan masuk sekolah swasta lebih mudah
 - c) Ada siswa yang menjadi pelaku atau korban bullying. Korban bullying merasa ketakutan dan trauma untuk kembali bersekolah
3. Sekolah
- a) Ada yang menolak siswa GKB karena merasa kewalahan menerima siswa baru di luar kuota penerimaan siswa setiap tahunnya
 - b) Sekolah menolak siswa GKB yang memiliki catatan buruk sebagai pelaku bullying yang bisa mengancam anak-anak lain
4. Masyarakat
- a) Masih terjadi di masyarakat bahwa dana yang digelontorkan kepada target GKB justru digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan untuk transport
 - b) Masih ada anggapan bahwa ijazah kurang penting karena ujung-ujungnya mencari nafkah.
 - c) Wali murid ATS yang mengedepankan mencari uang membuat anak menjadi berpikiran yang sama. Hal ini membuat pengurus FMPP level desa mengalami kesulitan dalam merekrut ATS untuk kembali bersekolah
 - d) Pandemi sempat mengubah kegiatan pembelajaran dari tatap muka menjadi full online. Hal ini membuat orangtua siswa target GKB justru menyuruh anaknya membantu pekerjaan rumah atau membantu mencari nafkah

Untuk program GKB ke depannya atau jangka panjangnya, maka pemerintah Kabupaten Brebes sepakat melakukan hal-hal berikut ini yakni:

- a. Memperluas cakupan usia sasaran program GKB di jenjang non formal. Sebelumnya jenjang sasaran GKB untuk nonformal maksimal 21 tahun diubah menjadi 55 tahun. Hal ini dilakukan untuk menurunkan angka buta huruf di Kabupaten Brebes
- b. Dana program GKB untuk usia 22 sampai 55 tahun akan didukung melalui dana APBD dan APBDes
- c. Dana program GKB untuk usia 7 sampai 21 tahun didukung melalui dana APBN dan APBD.
- d. Menerbitkan Perbup No 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Dewasa Tidak Sekolah Untuk Mendukung Pendidikan Sepanjang Hayat

Program GKB Kabupaten Brebes ini berhasil masuk dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik. Hal ini membuat pemerintah Kabupaten Brebes terus berinovasi memberikan perhatian penuh terhadap kelangsungan pendidikan bagi anak-anak di Kabupaten Brebes. Terutama anak yang putus sekolah agar mampu mengangkat derajat pendidikan dan berkurangnya kemiskinan di Kabupaten Brebes.

Kabupaten Brebes melalui program GKB ini memunculkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ribuan anak usia sekolah yang terpaksa putus sekolah karena berbagai faktor menjadi terbantu. Namun inovasi terus dilakukan. Kabupaten Brebes juga berusaha menurunkan angka buta huruf sehingga GKB tidak hanya ditujukan bagi anak putus sekolah namun juga warga Brebes yang tertinggal pendidikannya.

KESIMPULAN

Program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) di Kabupaten Brebes dilatarbelakangi jumlah anak tidak sekolah yang banyak di Kabupaten Brebes sehingga mengakibatkan rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Brebes di Provinsi Jawa Tengah yakni 64,16. Aktor yang terlibat pada players adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP). Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes berperan penting karena program ini menjadi kewajiban dalam pelayanan dasar bidang pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan, serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat Brebes.

FMPP merupakan lembaga khusus yang mengawal ATS kembali bersekolah. Lembaga ini terbentuk dari Kabupaten hingga desa. Unsur yang terlibat di dalam FMPP diantaranya lembaga swadaya masyarakat, media, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi profesi, Forum Corporate Social Responsibility, dan keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik ditingkat kabupaten, kecamatan dan pemerintahan di level desa.

Relasi aktor yang terlibat dalam GKB ini dilakukan dengan melakukan rapat koordinasi per tiga bulan di tingkat desa. Rapat dilakukan untuk menyampaikan kendala di lapangan dan menyampaikan solusi dari pengurus FMPP di level desa. Kemudian dilakukan evaluasi keseluruhan yang melibatkan FMPP Kabupaten, kecamatan dan desa.

Tantangan dalam implementasi program Gerakan Kembali Bersekolah di Kabupaten Brebes adalah:

- 1) Dari pemerintah adalah pencapaian target belum menyeluruh dan anggaran yang terbatas.
- 2) Dari siswa target GKB adalah masih ada siswa yang malas belajar, anggapan masuk sekolah negeri lebih susah dan siswa yang terlibat dalam bullying. Terutama korban menjadi takut sekolah.
- 3) Dari sekolah ada yang menolak karena kewalahan dengan jumlah siswa dan menolak karena siswa GKB yang masuk adalah pelaku bullying.
- 4) Dari masyarakat adalah dana GKB untuk keperluan lain di luar sekolah, anggapan ijazah tidak penting, dan menyuruh anak membantu orangtua mencari nafkah.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Belanja Publik Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Brebes, 2019. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
- Anderson, James. E. 2003. *Public Policy Making, Fifth Edition*. USA: Houghton Mifflin Company.
- Andriyanto, F. and Purnaweni, H., 2017. *Analisis Stakeholders Dalam Formulasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Semarang*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), pp.745-758.
- Arikunto. 2004. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bryson, John M. 2004. *What Do When Stakeholders Matter : Stakeholder identification and Analysis Techniques*. Minneapolis: Hubert H. Humphrey Institute of PublicAffairs.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Inc. Washington D.C
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. NewJersey:Princeton UniversityPress.
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Sinar Grafika
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media